



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 TAHUN 2026

**TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2026**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang berisi pelaksanaan kegiatan pengawas internal yang dilakukan oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan panduan bagi Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas:
- a. Faktor Risiko Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2026
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Arif Rachman

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2026

NOMOR : 14 TAHUN 2026
TANGGAL : 4 Februari 2026

**PENILAIAN 6 FAKTOR RISIKO UNIT ORGANISASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Intern		(6) Risiko Penyerapan Anggaran Eselon II		Jumlah Faktor Risiko	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Skor	Peringkat
1	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	4	Tinggi	4	Tinggi	2	Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah	2	Rendah	15	12
2	Pusat Data dan Informasi	3	Sedang	3	Sedang	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	1	Sangat Rendah	13	14
3	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	4	Tinggi	4	Tinggi	4	Tinggi	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	3	Sedang	20	2

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Intern		(6) Risiko Penyerapan Anggaran Eselon II		Jumlah Faktor Risiko	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Skor	Peringkat
4	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	3	Sedang	3	Sedang	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	3	Sedang	2	Rendah	17	4
5	Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	6	17
6	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	4	Tinggi	4	Tinggi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	2	Rendah	2	Rendah	14	13
7	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	1	Sangat Rendah	3	Sedang	2	Rendah	18	3
8	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	3	Sedang	17	5
9	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	4	Tinggi	21	1
10	Direktorat Perencanaan Transformasi,	2	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	14	10

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Intern		(6) Risiko Penyerapan Anggaran Eselon II		Jumlah Faktor Risiko	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Skor	Peringkat
	Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan														
11	Direktorat Sertifikasi Profesi	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	3	Sedang	13	13
12	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	3	Sedang	3	Sedang	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	3	Sedang	17	6
13	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	1	Sangat Rendah	12	16
14	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	2	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	5	Sangat Tinggi	2	Rendah	14	11
15	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	3	Sedang	3	Sedang	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	3	Sedang	15	7
16	Direktorat Advokasi	2	Rendah	2	Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Tinggi	5	Sangat Tinggi	15	8

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kegiatan Pengawasan Intern		(6) Risiko Penyerapan Anggaran Eselon II		Jumlah Faktor Risiko	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Skor	Peringkat
	Pemerintah Pusat														
17	Inspektorat	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	4	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	13	15

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2026
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TANGGAL : 4 Februari 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2026

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
1	Audit						
1.1	Audit Internal TIK SPBE	Pusat Data dan Informasi	6	40	1	September	Laporan
1.2	Audit Kinerja pada Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Strategi dan Kebijakan	8	60	1	April	Laporan
1.3	Audit Ketaatan atas Tugas dan Fungsi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia PBJ	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia PBJ	6	30	1	Juni	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN AUDIT			130	3		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2	Reviu						
2.1	Reviu atas Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2027	Sekretariat Utama	6	10	1	April	Laporan
2.2	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2027	Sekretariat Utama	6	10	1	Oktober	Laporan
2.3	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027	Sekretariat Utama	6	10	1	Oktober	Laporan
2.4	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokatif Tahun Anggaran 2027	Sekretariat Utama	6	10	1	Oktober	Laporan
2.5	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2028	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	5	15	1	Oktober	Laporan
2.6	Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri LKPP Tahun 2025	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri	6	20	1	Januari	Laporan
2.7	Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri	6	20	1	Februari	Laporan
2.8	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Semester I Tahun Anggaran 2026	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	6	20	1	Juli	Laporan
2.9	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2025 (Unaudited)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	5	30	1	Januari	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2.10	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	5	10	1	April	Laporan
2.11	Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026	Sekretariat Utama	8	40	1	Juli	Laporan
2.12	Reviu atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	6	10	1	Februari	Laporan
2.13	Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2025	Sekretariat Utama	7	10	1	Januari	Laporan
JUMLAH KEGIATAN REVIU				215	13		
3	Evaluasi						
3.1	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan IV Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	Januari	Laporan
3.2	Evaluasi Internal atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General Tahap Perencanaan (Ex-Ante) di Lingkungan LKPP Tahun 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Februari	Laporan
3.3	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan I Tahun 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	April	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
3.4	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan II Tahun 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Juli	Laporan
3.5	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan III Tahun 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Oktober	Laporan
3.6	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	4	30	1	Juli	Laporan
3.7	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital	4	30	1	Juni	Laporan
3.8	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	4	30	1	Mei	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
3.9	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	4	30	1	Agustus	Laporan
3.10	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretariat Utama	4	30	1	Juni	Laporan
3.11	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Data dan Informasi	4	30	1	Agustus	Laporan
3.12	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	4	30	1	Juli	Laporan
3.13	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Inspektorat	4	30	1	Mei	Laporan
3.14	Evaluasi atas Usulan Pembangunan Zona Integritas Lembaga Kebijakan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	20	1	April	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026						
3.15	Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko LKPP	Sekretariat Komite Manajemen Risiko	6	20	1	April	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN EVALUASI			330	15		
4	Pemantauan						
4.1	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	Juli	Laporan
4.2	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Januari	Laporan
4.3	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	April	Laporan
4.4	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Juli	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
	Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026						
4.5	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	5	1	Oktober	Laporan
4.6	Pemantauan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Januari	Laporan
4.7	Pemantauan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	April	Laporan
4.8	Pemantauan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Juli	Laporan
4.9	Pemantauan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Oktober	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.10	Pemantauan atas Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LHKASN dan LHKPN Bagi Pejabat dan Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	April	Laporan
4.11	Pemantauan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester II Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Januari	Laporan
4.12	Pemantauan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Semester I Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	Juli	Laporan
4.13	Pemantauan atas Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	5	1	Agustus	Laporan
4.14	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B12 Tahun 2025 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	3	5	1	Januari	Laporan
4.15	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B15 Tahun 2026 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian	3	5	1	April	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
		Bidang Transformasi Pengadaan Digital					
4.16	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B18 Tahun 2026 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	3	5	1	Juli	Laporan
4.17	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B21 Tahun 2026 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	3	5	1	Oktober	Laporan
4.18	Pemantauan atas Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan IV Tahun 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	Maret	Laporan
4.19	Pemantauan atas Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan I Tahun 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	April	Laporan
4.20	Pemantauan atas Pembangunan Zona Integritas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Triwulan II Tahun 2026	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	Oktober	Laporan
4.21	Pemantauan atas Tindak Lanjut atas Hasil Audit Keamanan BSSN	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	20	1	April	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.22	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Triwulan IV Tahun 2025	Inspektorat	5	10	1	Januari	Laporan
4.23	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Triwulan I Tahun 2026	Inspektorat	5	10	1	April	Laporan
4.24	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Triwulan II Tahun 2026	Inspektorat	5	10	1	Juli	Laporan
4.25	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Triwulan III Tahun 2026	Inspektorat	5	10	1	Oktober	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN			180	25		
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya dan Konsultasi						
5.1	Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2025	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	60	1	Februari	Laporan
5.2	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8	40	1	April	Laporan
5.3	Konsultasi Program Nasional PBJ	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8	10	1	Juni	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN KONSULTANSI			110	3		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
6	Peningkatan Kapabilitas APIP						
6.1	Pemantauan Implementasi Rencana Aksi <i>Area of Improvement</i> (AoI) Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025	Inspektorat	6	10	1	April	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP			10	1		
7	Evaluasi Kebijakan dan Hasil Pengawasan Intern						
7.1	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2025 pada GT A	Inspektorat	6	20	1	Februari	Laporan
7.2	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2025 pada GT B	Inspektorat	8	20	1	Maret	Laporan
7.3	Telaah Sejawat Intern atas Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2025 pada GT C	Inspektorat	8	20	1	Februari	Laporan
	JUMLAH KEGIATAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN HASIL PENGAWASAN INTERN			60	3		
9	Perencanaan Pengawasan Intern						
9.1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (Fraud) Inspektorat Tahun Anggaran 2027	Inspektorat	4	20	1	Desember	Rancangan PKPT
	JUMLAH KEGIATAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN			20	1		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi/Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
JUMLAH KESELURUHAN				1055	64		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA